

## ANALISIS POTENSI EKONOMI DENGAN PENENTUAN SEKTOR BASIS ANTAR KABUPATEN/KOTA SE- KARESIDENAN SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

**Sunardi**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten

[nardi@bps.go.id](mailto:nardi@bps.go.id)

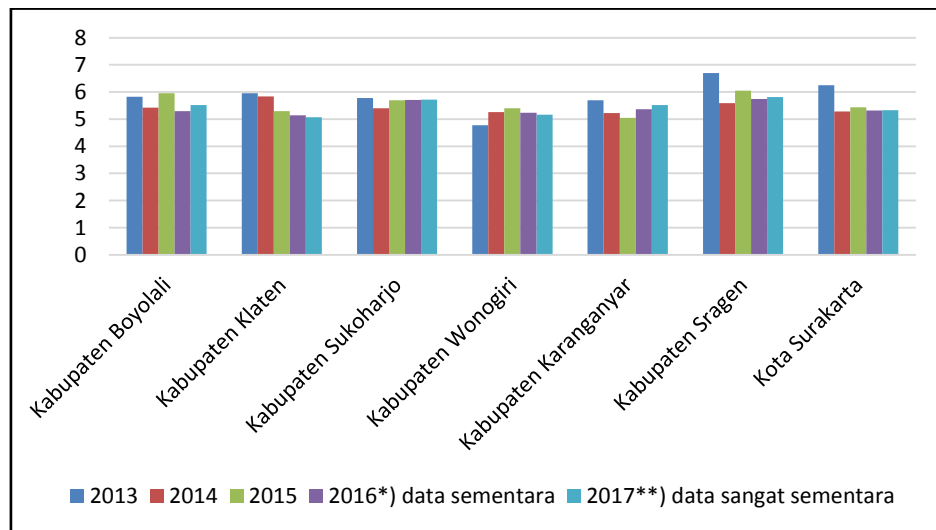
### *Abstrak*

*Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) menganalisis dan mengklasifikasikan sektor ekonomi kedalam sektor basis dan non basis; (2) mengetahui proyeksi setiap sektor, apakah tetap menjadi sektor basis di masa yang akan datang atau tidak; dan (3) mengetahui karakteristik pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota. Analisis yang digunakan adalah Analisis Location Quotient (LQ), Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ), dan Analisis Klassen Typology. Data yang digunakan adalah data Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha 2013-2017 wilayah di Kabupaten/Kota se-Karesidenan Surakarta Provinsi Jawa Tengah. Analisis LQ menunjukkan mayoritas sektor basis di Karesidenan Surakarta adalah Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas, Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda, Lapangan Usaha Jasa keuangan dan Asuransi, Lapangan Usaha Jasa Pendidikan, serta Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Analisis DLQ mengindikasikan bahwa Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Lapangan Usaha Industri Pengolahan masih menjadi sektor basis dimasa yang akan datang. Analisis Klassen Typology menunjukkan bahwa Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta terkategori sebagai daerah maju dan tumbuh cepat*

**Kata Kunci:** Sektor basis; pertumbuhan ekonomi; location quotient; dynamic location quotient; dan klassen typology

### **1. PENDAHULUAN**

Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Klaten sebagai implementasi program kerja jangka panjang dan jangka pendek telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, baik di bidang sosial maupun ekonomi. Hal ini ditandai dengan adanya penurunan angka pengangguran dari sebesar 4,35 persen di bulan agustus 2017 menjadi 3,11 persen di agustus 2018. Serta peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahun 2017 sebesar 5,07, meskipun selama 5 (lima) tahun terakhir merupakan pertumbuhan paling kecil. Pertumbuhan ekonomi yang berkisar di angka 5 ini juga diikuti oleh kabupaten/kota yang ada di Karesidenan Surakarta. Namun untuk kondisi selama 5 tahun terakhir, semua kabupaten/kota selain Kabupaten Klaten mengalami fluktuatif.



Gambar 1 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kota Se-Karesidenan Surakarta 2013-2017

Pada hakekatnya, arah pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik disertai dengan tingkat pemerataan yang baik pula. Namun harus disadari, dibalik tingginya pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai, ternyata gagal mewujudkan pemerataan pendapatan karena mengabaikan penguatan ekonomi daerah. Hal ini bisa dilihat dari angka gini ratio kabupaten/kota se-Karesidenan Surakarta tahun 2013-2015 yang angkanya bervariasi sekitar angka 0,35 yang artinya pola pengeluaran masyarakat ada pada ketimpangan taraf sedang.

Tabel 1 Pemerataan Pendapatan Penduduk menurut Gini Ratio kabupaten/Kota se-Karesidenan Surakarta Tahun 2013-2015

Tahun	Kabupaten Boyolali	Kabupaten Klaten	Kabupaten Sukoharjo	Kabupaten Wonogiri	Kabupaten Karanganyar	Kabupaten Sragen	Kota Surakarta
2013	0,40	0,34	0,34	0,34	0,33	0,35	0,35
2014	0,30	0,36	0,35	0,33	0,36	0,33	0,36
2015	0,34	0,35	0,35	0,31	0,33	0,37	0,35

Sumber : BPS, 2013-2015

Penguatan dan perluasan sektor basis di setiap daerah menjadi pilihan untuk menjawab berbagai permasalahan ekonomi dan sosial di daerah. Dalam lingkup ekonomi regional, sektor basis dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain di pasar regional [Wijaya, 1996]. Sektor basis merupakan kegiatan ekonomi yang melayani baik pasar domestik maupun pasar luar daerah itu sendiri. Sektor basis juga mampu

menghasilkan produk/jasa yang mendatangkan uang dari luar wilayah. Ini berarti daerah tersebut secara tidak langsung mempunyai kemampuan untuk mengeksport barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor basis ke daerah lain. Artinya sektor ini dalam aktivitasnya mampu memenuhi kebutuhan daerah sendiri maupun daerah lain dan dapat dijadikan sektor unggulan.

Jika ada sektor basis, tentu juga ada sektor non basis. Sektor non basis merupakan sektor atau kegiatan yang hanya mampu melayani pasar daerah itu sendiri sehingga permintaannya sangat dipengaruhi kondisi ekonomi setempat dan tidak bisa berkembang melebihi pertumbuhan ekonomi wilayah serta kapasitas ekspor daerah belum berkembang. Sektor seperti ini dikenal sebagai sektor non unggulan.

Ada beberapa metode untuk memilah antara kegiatan sektor basis dan non basis. Menurut Tarigan (2009:32-33) menyatakan ada metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung adalah dengan melakukan survei secara langsung. Metode ini terlalu rumit apabila ditinjau dari sudut waktu dan biaya. Sedangkan metode tidak langsung adalah dengan menggunakan data yang telah tersedia di Badan Pusat Statistik (BPS) yakni Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan menggunakan metode *Location Quotient (LQ)* dapat diketahui bahwa di suatu wilayah, selama periode pengamatan terdapat beberapa sektor ekonomi yang dapat dijadikan sebagai sektor ekonomi unggulan, potensial atau basis. Teknis LQ mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan industri dalam suatu daerah dengan cara membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah itu dengan peranan kegiatan industri sejenis dalam perekonomian regional.

Perencanaan pengembangan ekonomi wilayah yang berbasis pada penentuan sektor basis ini, harus didukung informasi tentang karakteristik pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur ekonomi di setiap daerah serta pengaruh pertumbuhan ekonomi antar daerah. *Analysis Klasen Typologi* merupakan alat untuk mengetahui karakteristik pertumbuhan ekonomi masing-masing wilayah. Cara kerja analisis ini adalah menghitung perbandingan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan perkapita masing-masing daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan perkapita wilayah di atasnya.

Adanya perbedaan pola pertumbuhan ekonomi dan perubahan peranan setiap sektor yang ada di semua Kabupaten/kota se-Karesidenan Surakarta, penelitian disini bertujuan untuk:

- i. menganalisis dan mengklasifikasikan sektor ekonomi kedalam sektor basis dan non basis;
- ii. mengetahui proyeksi setiap sektor, apakah tetap menjadi sektor basis di masa yang akan datang atau tidak; dan
- iii. mengetahui karakteristik pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota;

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan metode kuantitatif. Untuk jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan data yang sudah dirilis oleh BPS yakni Publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha 2013-2017 semua Kabupaten/Kota yang ada di Karesidenan Surakarta. Sedangkan sebagai pembanding, digunakan data Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha 2013-2017.

Tabel 2 : kode lapangan usaha yang dipakai pada pembentukan PDRB kabupaten/kota se-Karesidenan Surakarta.

Kode	Lapangan Usaha
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
B	Pertambangan dan Penggalian
C	Industri Pengolahan
D	Pengadaan Listrik dan Gas
E	Pengadaan Air, Penegelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
F	Konstruksi
G	Perdagangan Besar dan Ecerean; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H	Transportasi dan Perudangan
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
J	Informasi dan Komunikasi
K	Jasa Keuangan dan Asuransi
L	Real Estat
M,N	Jasa perusahaan
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
P	Jasa Pendidikan
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
R,S,T,U	Jasa Lainnya

Sumber : BPS

Untuk menghasilkan tujuan penelitian diatas, data-data tersebut diolah dengan beberapa pendekatan:

### a. Analisis *Location Quotient* (LQ)

Penggunaan pendekatan ini dengan pertimbangan bahwa metode ini memiliki 2 (dua) keunggulan yakni: 1) Analisis LQ memperhitungkan ekspor tidak langsung dan ekspor langsung; 2) metode ini tidak mahal dan dapat diterapkan kepada data untuk mengetahui *trend*. Jika ada kelebihan, tentu juga ada kelemahan. Kelemahan metode ini karena didasarkan pada asumsi bahwa produktifitas rata-rata dan konsumsi rata-rata antar wilayah adalah sama.

Pendekatan LQ ini digunakan untuk mengetahui sektor basis dan bukan basis dalam perekonomian antar daerah di Karesidenan Surakarta. Adapun model persamaan matematika seperti yang dikemukakan oleh Widodo (2006:116) sebagai berikut:

$$LQ = \frac{PDRB_{ij}/TPDRB_j}{PDRB_i/PDRB}$$

Keterangan : LQ = Indeks *Location Quotient*  
 PDRB<sub>ij</sub> = PDRB Sektor i di Kabupaten/Kota j di Karesidenan Surakarta  
 TPDRB<sub>j</sub> = Total PDRB di Kabupaten/Kota j di Karesidenan Surakarta  
 PDRB<sub>i</sub> = PDRB Sektor i di Propinsi Jawa Tengah  
 TPDRB = Total PDRB di Propinsi Jawa Tengah

Untuk menginterpretasi nilai LQ, seperti yang dikemukakan oleh Bendavid-Val (1991) adalah:

- 1) Jika nilai  $LQ > 1$ , artinya kemampuan kontribusi sektor terhadap PDRB lebih besar dibandingkan kemampuan rata-rata sektor sejenis di wilayah referensi, sehingga merupakan sektor basis.
- 2) Jika nilai  $LQ = 1$ , artinya kemampuan kontribusi sektor terhadap PDRB sama dengan kemampuan rata-rata sektor sejenis di wilayah referensi, sehingga hanya dapat mencukupi kebutuhan di dalam daerah sendiri.
- 3) Jika nilai  $LQ < 1$ , artinya kemampuan kontribusi sektor terhadap PDRB lebih kecil dibandingkan kemampuan rata-rata sektor sejenis di wilayah referensi, sehingga bukan merupakan sektor basis.

b. Analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ)

Metode LQ mempunyai kelemahan yakni bersifat statis atau hanya memberi gambaran pada waktu tertentu. Untuk mengantisipasi kelemahan ini digunakanlah metode *Dinamic Location Quotient* (DLQ), sehingga dapat diketahui perubahan atau reposisi sektoral (Suyatno, 2000). Formula matematisnya adalah:

$$DLQ = \frac{\left[\frac{1 + g_{ij}}{1 + g_j}\right]^t}{\left[\frac{1 + G_{in}}{1 + G_n}\right]^t}$$

Keterangan : DLQ = Indeks *Dynamic Location Quotient*  
 $g_{ij}$  = laju pertumbuhan PDRB Sektor i di Kabupaten/Kota j di Karesidenan Surakarta  
 $g_j$  = laju pertumbuhan Total PDRB di Kabupaten/Kota j di Karesidenan Surakarta

- $G_{in}$  = laju pertumbuhan PDRB Sektor i di Propinsi Jawa Tengah
- $G_n$  = laju pertumbuhan Total PDRB di Propinsi Jawa tengah
- $t$  = kurun waktu analisis

Kriterianya adalah:

- a.  $DLQ > 1$ , sektor i masih dapat diharapkan untuk menjadi basis di masa yang akan datang.
- b.  $DLQ < 1$ , sektor i tidak dapat diharapkan untuk menjadi basis di masa yang akan datang.
- c. *Analysis Klassen Typology*

Untuk mengetahui karakteristik pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota di Karesidenan Surakarta, maka digunakanlah metode *Analysis Klassen Typology*. Cara kerja analisis ini adalah menghitung perbandingan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masing-masing kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita Provinsi Jawa Tengah. Perumusan matematikanya adalah:

$$r_j = \frac{V_{jt} - V_{jo}}{V_{jo}} \times 100\%$$

$$r_n = \frac{V_{nt} - V_{no}}{V_{no}} \times 100\%$$

$$Y_j = \frac{V_j}{P_j}$$

$$Y_n = \frac{V_n}{P_n}$$

- Keterangan :
- $r_j$  = laju pertumbuhan kabupaten/kota se-Karesidenan Surakarta
  - $V_{jo}$  = PDRB kabupaten/kota se-Karesidenan Surakarta tahun awal
  - $V_{jt}$  = PDRB kabupaten/kota se-Karesidenan Surakarta tahun akhir
  - $r_n$  = laju pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah
  - $V_{no}$  = PDRB Provinsi Jawa Tengah tahun awal
  - $V_{nt}$  = PDRB Provinsi Jawa Tengah tahun akhir
  - $Y_j$  = pendapatan perkapita kabupaten/kota se-Karesidenan Surakarta
  - $Y_n$  = pendapatan perkapita Provinsi Jawa Tengah
  - $V_j$  = PDRB kabupaten/kota se-Karesidenan Surakarta
  - $V_n$  = PDRB Provinsi Jawa Tengah

- $P_j$  = jumlah penduduk pertengahan tahun kabupaten/kota se-Karesidenan Surakarta  
 $P_n$  = jumlah penduduk pertengahan tahun Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan *analysis klassen typology*, karakteristik pertumbuhan daerah terkategori seperti berikut:

- 1) Daerah maju dan tumbuh cepat, apabila ( $r_j > r_n$  dan  $Y_j > Y_n$ )
- 2) Daerah maju tapi tertekan, apabila ( $r_j < r_n$  dan  $Y_j > Y_n$ )
- 3) Daerah yang sedang tumbuh, apabila ( $r_j > r_n$  dan  $Y_j < Y_n$ )
- 4) Daerah yang relative tertinggal, apabila ( $r_j < r_n$  dan  $Y_j < Y_n$ )

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.

Tabel 3. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten/Kota se-Karesidenan Surakarta di Provinsi Jawa Tengah ADHB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2017

Lapangan Usaha	Kabupaten Boyolali	Kabupaten Klaten	Kabupaten Sukoharjo	Kabupaten Wonogiri	Kabupaten Karanganyar	Kabupaten Sragen	Kota Surakarta
A	22,43	11,37	9,29	31,48	13,51	15,74	0,50
B	3,99	3,19	0,46	3,19	1,22	2,94	0,00
C	29,53	36,30	39,13	16,40	45,89	36,07	8,47
D	0,02	0,15	0,12	0,07	0,15	0,15	0,20
E	0,02	0,04	0,04	0,06	0,07	0,06	0,15
F	6,42	6,11	6,66	6,87	6,58	6,68	26,71
G	12,62	16,63	17,45	15,66	11,20	18,61	22,43
H	5,22	2,14	3,27	6,20	2,60	2,44	2,72
I	2,64	3,48	3,82	2,42	3,33	3,01	5,85
J	2,34	3,20	4,40	0,80	1,09	1,20	11,09
K	2,31	3,45	3,83	3,26	3,62	2,85	3,89
L	1,08	1,30	2,23	0,76	1,71	0,88	4,07
M,N	0,36	0,33	0,40	0,42	0,36	0,42	0,80
O	2,64	2,47	2,34	3,05	2,02	2,21	5,72
P	5,76	6,92	4,23	6,57	4,39	4,42	5,34
Q	0,96	1,20	0,98	1,01	0,83	0,75	1,11
R,S,T,U	1,65	1,70	1,38	1,78	1,41	1,57	0,94
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS, 2017

Pada tahun 2017, struktur ekonomi semua kabupaten se-Karesidenan Surakarta didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, yakni : Pertanian, kehutanan, dan perikanan; Industri pengolahan; dan Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Sedangkan Kota Surakarta

dominasi lapangan usahanya berbeda, yakni : Konstruksi, Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; dan Informasi dan Komunikasi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB kabupaten/kota se-Karesidenan Surakarta diatas.

a. Analisis Sektor Basis Antar Kabupaten/Kota se-Karesidenan Surakarta

Analisis sektor ekonomi kabupaten/kota se-Karesidenan Surakarta, ternyata tidak semua 3 lapangan usaha yang berperan dalam pembentukan PDRB sebagai sektor basis di daerah tersebut. Beberapa kabupaten tersebut adalah Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar untuk lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Untuk lapangan usaha Industri Pengolahan berada di Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Wonogiri. Sedangkan Lapangan Usaha Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan sepeda berada di Kabupaten Boyolali dan Karanganyar. Untuk Kota Surakarta, terlihat ada korelasi dan hubungan yang erat antara kontribusi lapangan usaha dengan kebasisan sektor. Analisis LQ menunjukkan mayoritas sektor basis di Karesidenan Surakarta adalah lapangan usaha pengadaan listrik dan gas, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda, lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi, lapangan jasa pendidikan, serta lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Berdasarkan Analisis LQ, terlihat ada beberapa lapangan usaha tertentu pada kabupaten/kota mengalami fluktuasi kebasisan atau reposisi sektor, dimana pada tahun 2013 lapangan usaha tersebut masih menjadi sektor basis, namun pada tahun 2017 lapangan usaha tersebut tidak lagi menjadi sektor basis (non basis). Perubahan kebasisan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan lapangan usaha pada masing-masing kabupaten/kota yang berakibat pada perubahan kontribusi lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB kabupaten/kota dibandingkan dengan lapangan usaha yang sama pada tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 4. Sektor Basis Kabupaten/Kota se\_karesidenan Surakarta berdasarkan Koefisien LQ Tahun 2013 & 2017

Lapangan Usaha	Kabupaten Boyolali		Kabupaten Klaten		Kabupaten Sukoharjo		Kabupaten Wonogiri		Kabupaten Karanganyar		Kabupaten Sragen		Kota Surakarta	
	2013	2017	2013	2017	2013	2017	2013	2017	2013	2017	2013	2017	2013	2017
A	1,561	1,592	0,837	0,807	0,670	0,659	2,262	2,234	0,936	0,959	1,275	1,117	0,034	0,035
B	1,985	1,576	1,464	1,261	0,222	0,184	1,613	1,262	0,582	0,483	1,247	1,163	0,000	0,001
C	0,767	0,845	0,936	1,038	1,111	1,119	0,409	0,469	1,280	1,313	0,886	1,032	0,238	0,242
D	0,222	0,206	1,667	1,627	1,444	1,222	0,667	0,769	1,667	1,627	1,667	1,583	2,222	2,117
E	0,857	0,820	0,714	0,691	0,571	0,592	1,000	1,046	1,143	1,103	1,000	0,977	2,429	2,497



Lapangan Usaha	Kabupaten Boyolali	Kabupaten Klaten	Kabupaten Sukoharjo	Kabupaten Wonogiri	Kabupaten Karanganyar	Kabupaten Sragen	Kota Surakarta							
F	0,630	0,620	0,606	0,590	0,634	0,643	0,623	0,663	0,624	0,636	0,673	0,645	2,647	2,579
G	1,007	0,928	1,338	1,223	1,298	1,284	1,156	1,152	0,834	0,824	1,442	1,369	1,684	1,649
H	1,646	1,629	0,726	0,667	1,032	1,020	1,926	1,936	0,860	0,812	0,846	0,761	0,860	0,850
I	0,864	0,823	1,166	1,087	1,197	1,192	0,769	0,755	1,071	1,041	0,929	0,940	1,881	1,827
J	0,740	0,710	1,096	0,971	1,238	1,334	0,238	0,244	0,367	0,331	0,357	0,365	3,540	3,364
K	0,376	0,779	1,216	1,163	1,351	1,292	1,046	1,099	1,234	1,220	0,968	0,962	1,301	1,312
L	0,200	0,645	0,800	0,777	1,338	1,333	0,444	0,452	1,056	1,026	0,544	0,526	2,469	2,438
M,N	8,818	0,960	0,909	0,889	1,091	1,065	1,091	1,128	0,939	0,953	1,152	1,115	2,182	2,126
O	1,798	0,946	0,902	0,885	0,842	0,839	1,034	1,093	0,768	0,726	0,822	0,793	2,054	2,054
P	0,215	1,314	1,641	1,579	0,970	0,965	1,478	1,499	1,042	1,003	1,012	1,008	1,307	1,218
Q	3,205	1,099	1,436	1,378	1,090	1,117	1,141	1,162	0,974	0,946	0,949	0,865	1,308	1,269
R,S,T,U	1,141	1,059	1,141	1,093	0,937	0,886	1,183	1,144	0,958	0,909	1,113	1,009	0,662	0,608
PDRB	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Sumber : BPS (diolah), 2013 & 2017

Untuk menyempurnakan kelemahan metode analisis LQ yang cenderung statis maka dilakukanlah analisis DLQ. Analisis DLQ ini digunakan untuk mengetahui proyeksi setiap lapangan usaha, apakah tetap menjadi sektor basis dimasa yang akan datang atau tidak. Secara umum, berdasarkan analisis DLQ, terlihat lapangan usaha industri pengolahan tetap menjadi sektor basis semua kabupaten/kota se-Karesidenan Surakarta. Sedangkan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan juga menjadi sektor basis di kabupaten/kota se-Karesidenan Surakarta selain Kabupaten Sragen. Kedua sektor ini tetap konsisten sebagai sektor basis di kabupaten tersebut pada masa ini maupun masa yang akan datang karena kemampuan lapangan usaha ini dalam mempertahankan volume produksi. Akibatnya kedua lapangan usaha ini pertumbuhannya cukup stabil dan lebih tinggi dibandingkan dengan lapangan usaha yang sama pada tingkat provinsi Jawa tengah. Hasil analisis DLQ kabupaten/kota se-Karesidenan Surakarta terlihat pada tabel 4.

Penguatan dan perluasan sektor basis di setiap daerah sangat penting untuk menggerakkan perekonomian daerah, karena besarnya basis dalam suatu daerah akan menambah permintaan barang dan jasa dari luar daerah tersebut yang berakibat pada penambahan devisa daerah. Sesuai dengan teori pertumbuhan jalur cepat (*turnpike*), bahwa setiap wilayah perlu melihat lapangan usaha / komoditi apa yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat, baik karena potensi alam maupun karena lapangan usaha itu memiliki *competitive advantage* untuk

dikembangkan. Artinya, dengan kebutuhan modal yang sama lapangan usaha tersebut dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar, dapat berproduksi dalam waktu yang relatif singkat dan volume sumbangan untuk perekonomian juga cukup besar.

Tabel 5. Hasil Analisis DLQ Kabupaten/Kota se-Karesidenan Surakarta periode 2013-2017

Lapangan Usaha	Kabupaten Boyolali	Kabupaten Klaten	Kabupaten Sukoharjo	Kabupaten Wonogiri	Kabupaten Karanganyar	Kabupaten Sragen	Kota Surakarta
A	1,896	4,100	0,718	1,276	4,683		2,313
B							
C	5,393	10,524	1,447	6,007	1,818	8,347	1,306
D	1,009	1,849		4,978			
E		11,510	1,896	1,413			
F		1,321		2,732	1,640		
G				1,535	1,148		1,003
H		2,104	1,611	2,237			
I		1,080					
J			1,697	2,179		1,326	
K		1,668		2,418			
L	1,018	2,055	1,008	1,515			
M,N		2,890		1,463	1,134		
O		2,872		2,893			1,340
P		2,011		1,851			
Q		2,652	1,038	1,388			
R,S,T,U		2,463		0,713			
PDRB	1,896	4,100		1,276	4,683		2,313

Sumber : BPS (diolah), 2013-2017

b. Karakteristik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Se-Karesidenan Surakarta

Kesesuaian antara sektor basis dengan perencanaan ekonomi daerah sebagai ruang dapat diamati dan dievaluasi berdasarkan karakteristik pertumbuhan ekonomi suatu daerah, apakah sektor basis di daerah tersebut dapat menjadi sektor penggerak utama pembangunan ekonomi maupun efek ganda terhadap sektor lainnya. Hal ini tergambar secara umum pada karakteristik pertumbuhan ekonomi daerah karena karakteristik pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan apakah daerah tersebut maju dan tumbuh cepat, maju tapi tertekan, sedang tumbuh atau relative tertinggal.

Pengukuran karakteristik pertumbuhan ekonomi sebagaimana dalam *analysis klassen typology*, diperoleh dari hasil perbandingan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita kabupaten/kota se-Karesidenan Surakarta dengan Provinsi Jawa Tengah. Sehingga hubungannya sangat korelatif antara kemajuan lapangan usaha dengan tingkat pendapatan perkapita daerah sebagai ruang. Untuk mengetahui karakteristik pertumbuhan ekonomi tersebut terlihat pada Tabel 5.

Dari tabel 4 dibawah, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen dan Kota Surakarta terkategori sebagai daerah maju dan tumbuh pesat karena pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapitanya lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah. Untuk kabupaten yang terkategori maju tapi tertekan dan sedang tumbuh hanya ada satu kabupaten, yakni Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali. Sedangkan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri terkategori sebagai daerah yang relatif tertinggal karena pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapitanya lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 6. Karakteristik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Karesidenan Surakarta periode 2013-2017

		Pendapatan Per kapita	
Laju Pertumbuhan	$Y_j > y_n$	$Y_j < y_n$	
	Daerah Maju dan Tumbuh Pesat	Daerah Tumbuh	Sedang
$r_j > r_n$	- Kabupaten Sukoharjo - Kabupaten Sragen - Kota Surakarta	- Kabupaten Boyolali	
	Daerah Maju Tapi Tertekan	Daerah Tertinggal	Relatif
$r_j < r_n$	- Kabupaten Karanganyar	- Kabupaten Klaten - Kabupaten Wonogiri	

Sumber : BPS (diolah), 2013-2017

#### 4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis potensi ekonomi dengan penentuan sektor basis kabupaten/kota se-Karesidenan Surakarta, maka dapat disimpulkan bahwa: (1). Berdasarkan analisis LQ, tidak semua 3 lapangan usaha yang berperan dalam pembentukan PDRB sebagai sektor basis. Masing-masing kabupaten/kota memiliki sektor basis yang berbeda-beda, meskipun ada beberapa kabupaten/kota yang memiliki kesamaan. Analisis LQ menunjukkan mayoritas sektor basis di Karesidenan Surakarta adalah Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas, Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda, Lapangan Usaha Jasa keuangan dan Asuransi, Lapangan Usaha Jasa Pendidikan, serta Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. (2). Berdasarkan analisis DLQ, lapangan usaha industri pengolahan tetap menjadi sektor basis semua kabupaten/kota se-Karesidenan Surakarta. Sedangkan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi sektor basis di kabupaten/kota se-Karesidenan Surakarta kecuali

Kabupaten Sragen. (3). Berdasarkan analisis klasifikasi typology daerah yang terkategori maju dan tumbuh pesat adalah kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen dan Kota Surakarta. Untuk kabupaten yang terkategori maju tapi tertekan dan sedang tumbuh hanya ada satu kabupaten, yakni Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali. Sedangkan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri terkategori sebagai daerah yang relatif tertinggal.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Bendavid-Val., Avrom, 1991. *Regional and Local Economic Analysis for Practitioners*, Fourth edition, New York: Prager Publisher.
- BPS Kabupaten Boyolali (2018). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Boyolali Menurut lapangan Usaha 2013-2017*. Boyolali, Jawa Tengah: BPS.
- BPS Kabupaten Klaten (2018). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Klaten Menurut lapangan Usaha 2013-2017*. Klaten, Jawa Tengah: BPS.
- BPS Kabupaten Sukoharjo (2018). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sukoharjo Menurut lapangan Usaha 2013-2017*. Sukoharjo, Jawa Tengah: BPS.
- BPS Kabupaten Wonogiri (2018). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonogiri Menurut lapangan Usaha 2013-2017*. Wonogiri, Jawa Tengah: BPS.
- BPS Kabupaten Karanganyar (2018). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Karanganyar Menurut lapangan Usaha 2013-2017*. Karanganyar, Jawa Tengah: BPS.
- BPS Kabupaten Sragen (2018). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sragen Menurut lapangan Usaha 2013-2017*. Sragen, Jawa Tengah: BPS.
- BPS Kota Surakarta (2018). *Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Menurut lapangan Usaha 2013-2017*. Surakarta, Jawa Tengah: BPS.
- BPS Kabupaten Klaten (2018). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Klaten 2017*. Klaten, Jawa Tengah: BPS.
- BPS Provinsi Jawa Tengah (2018). *Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 2013-2015*. Jawa Tengah: BPS.
- BPS Provinsi Jawa Tengah (2018). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah Menurut lapangan Usaha 2013-2017*. Jawa Tengah: BPS.
- BPS Provinsi Jawa Tengah (2018). Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah Agustus 2018. *Berita Resmi Statistik*. Boyolali, Jawa Tengah: BPS.

- Suyatno (2000). Analisa Economic Base Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tingkat II Wonogiri : Menghadapi Implementasi UU No. 22/1999 dan UU No. 5/1999. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Balai Penelitian dan Pengembangan Ekonomi*. FE UMS. Surakarta
- Tarigan, Henry Guntur. 2009. *PengkajianPragmatik*. Bandung: Angkasa
- Tri Widodo . 2006. *Perencanaan Pembangunan, Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*, Penerbit UPP STIM YKPN: Yogyakarta
- Wijaya, A. 1996. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Pilihan Pembangunan Industri : Kasus DKI Jakarta*, No IV (2), Jakarta.